



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi Daerah dan asas tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Distrik adalah sebutan lain dari Kecamatan yaitu bagian wilayah dari Kabupaten Manokwari yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Kampung adalah sebutan lain dari Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Badan Musyawarah Kampung disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana Teknis.
13. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat PERKAM adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan PERKAM.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan PERKAM.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan PERKAM.
17. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Keputusan Kepala Kampung adalah Penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Kampung.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung.
22. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung di Kabupaten Manokwari yang telah diregistrasi dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang diterima oleh Kampung dari 10 % ( sepuluh persen ) Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten Manokwari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan tertuang dalam APBD Kabupaten Manokwari.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Kabupaten Manokwari yang ditetapkan oleh Bupati Manokwari.
25. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

### Pasal 2

Rincian ADK setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Proporsional; dan
- b. alokasi Prioritas.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung, perangkat kampung, tunjangan dan operasional BAMUSKAM di setiap Kampung selama satu Tahun Anggaran yang juga memperhatikan kinerja Pemerintah Kampung dan Bamuskam di tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Alokasi Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan memperhatikan kebutuhan kegiatan prioritas yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan di tahun anggaran berjalan.

### Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke:
  - a. RKK; dan
  - b. Rekening pribadi bagi penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II paling lambat bulan September sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling lambat bulan Desember sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- (3) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK dan Rekening Pribadi Penerima Penghasilan Tetap tahap I dilaksanakan setelah Bupati Manokwari menerima dokumen dari Kepala Kampung, berupa:
  - a. PERKAM tentang APBK Tahun 2022; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK dan Rekening Pribadi Penerima Penghasilan Tetap tahap II dilaksanakan setelah Bupati Manokwari menerima Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap I dari Kepala Kampung.
- (5) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK dan Rekening Pribadi Penerima Penghasilan Tetap tahap III dilaksanakan setelah Bupati Manokwari menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADK Tahap II dari Kepala Kampung.

Pasal 6

- (1) Permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati Manokwari cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setelah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari Kepala Distrik.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Rekomendasi dari Kepala Distrik dan sepanjang memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung wajib merekomendasikan permohonan tersebut kepada BPKAD guna penerbitan SP2D untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke RKK dan/atau Rekening pribadi penerima penghasilan tetap.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala BPKAD wajib menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana dimaksud.

- (4) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan penyaluran Dana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari wajib memberitahukan kekurangannya kepada Kepala Kampung untuk dilengkapi.

## BAB IV PENGUNAAN DANA

### Pasal 7

ADK diprioritaskan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Tunjangan Perangkat Kampung, Tunjangan BAMUSKAM, Operasional Pemerintah Kampung dan Operasional BAMUSKAM.
- b. kegiatan prioritas lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

### Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung dilakukan secara terintegrasi dengan APBK.
- (2) Kepala Kampung selaku PKPKK bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Kampung.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan diarsipkan dengan baik di Kampung.
- (4) Kepala Distrik bertanggungjawab memfasilitasi, membina, dan mengawasi setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 10

Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi Kampung atau media lainnya sesuai kondisi di Kampung.



BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa setiap tahapan penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahun sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahap I; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 September tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung Tahap III disampaikan paling lambat tanggal 7 Desember tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* dimaksud langsung kepada Bupati Manokwari.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADK

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 12

Pembinaan atas ADK dilakukan oleh Bupati Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembina atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Susunan Tim Pembina ADK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan terhadap ADK dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Kampung selaku PKPKK terhadap PTPKK dan Kepala Urusan Keuangan Kampung;
- b. pengawasan Struktural dilakukan oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari; dan
- c. pengawasan Fungsional dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI MANOKWARI,  
CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
Pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NUNING DWI LESTARI  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004





**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI SETIAP KAMPUNG  
 DI KABUPATEN MANOKWARI  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

(ribu rupiah)

NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI PRIORITAS									PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG per-KAMPUNG
				BIMBINGAN TEKNIS BAGI KEPALA KAMPUNG	PELATIHAN REGISTRASI BUMDes	BPJS TK PEMERINTAH KAMPUNG DAN BAMUSKAM	BPJS KESEHATAN PEMERINTAH KAMPUNG	SOSIALISASI REGULASI DAN PEMILIHAN BAMUSKAM	PELATIHAN SIKAMPUNG	PELATIHAN KPM DAN IDM	PELATIHAN SISKEUDES	PELATIHAN KADER TEKNIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)
1	Manokwari Barat	Ingramui	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
2	Manokwari Barat	Soribo	357,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	385,024
3	Manokwari Barat	Tanah Merah Indah	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
4	Manokwari Barat	Udopi	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
5	Manokwari Selatan	Acemo	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
6	Manokwari Selatan	Anggresi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
7	Manokwari Selatan	Dihara	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
8	Manokwari Selatan	Dobut	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
9	Manokwari Selatan	Katebu	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
10	Manokwari Selatan	Maruni	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
11	Manokwari Selatan	Masyepi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
12	Manokwari Selatan	Misapmeysi	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
13	Manokwari Selatan	Mupi	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
14	Manokwari Selatan	Ngunimbouw	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
15	Manokwari Selatan	Waluri	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
16	Manokwari Selatan	Wamesa	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
17	Manokwari Selatan	Warkomi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
18	Manokwari Selatan	Warmomi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
19	Manokwari Selatan	Warswami	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
20	Manokwari Selatan	Wasai	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
21	Manokwari Timur	Aipiri	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
22	Manokwari Timur	Arowi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
23	Manokwari Timur	Ayambori	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
24	Manokwari Timur	Bakaro	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
25	Manokwari Timur	Mansinam	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
26	Manokwari Timur	Susweni	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
27	Manokwari Utara	Asai	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
28	Manokwari Utara	Bremi	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
29	Manokwari Utara	Cabang Dua	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
30	Manokwari Utara	Indou Oufa	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
31	Manokwari Utara	Inoduas	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
32	Manokwari Utara	Inya	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536

NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI PRIORITAS									PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG per-KAMPUNG
				BIMBINGAN TEKNIS BAGI KEPALA KAMPUNG	PELATIHAN REGISTRASI BUMDes	BPJS TK PEMERINTAH KAMPUNG DAN BAMUSKAM	BPJS KESEHATAN PEMERINTAH KAMPUNG	SOSIALISASI REGULASI DAN PEMILIHAN BAMUSKAM	PELATIHAN SIKAMPUNG	PELATIHAN KPM DAN IDM	PELATIHAN SISKEUDES	PELATIHAN KADER TEKNIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)
33	Manokwari Utara	Inyei	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
34	Manokwari Utara	Lebau	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
35	Manokwari Utara	Mandopi	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
36	Manokwari Utara	Meyes	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
37	Manokwari Utara	Meyunfoka	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
38	Manokwari Utara	Mubraidiba	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
39	Manokwari Utara	Mubri	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
40	Manokwari Utara	Pami	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
41	Manokwari Utara	Sairo	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
42	Manokwari Utara	Saubeba	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
43	Manokwari Utara	Singgimeba	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
44	Manokwari Utara	Tanah Rubuh	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
45	Manokwari Utara	Teluk Mubri	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
46	Manokwari Utara	Warbefor	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
47	Manokwari Utara	Yonggam	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
48	Manokwari Utara	Yoom I	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
49	Manokwari Utara	Yoom II	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
50	Masni	Aska	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
51	Masni	Aurmios	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
52	Masni	Bowi Subur	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
53	Masni	Igor	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
54	Masni	Jowen	302,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	329,536
55	Masni	Kali Merah	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
56	Masni	Koyani	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
57	Masni	Macuan	357,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	385,024
58	Masni	Makwan	302,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	329,536
59	Masni	Mansaburi	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
60	Masni	Mantedi	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
61	Masni	Masni	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
62	Masni	Meiforga	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
63	Masni	Membowi	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
64	Masni	Merejemeg	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
65	Masni	Meyeruk	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
66	Masni	Meyof II	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
67	Masni	Moubja	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
68	Masni	Muara Prafi	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
69	Masni	Muara Wariori	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
70	Masni	Prafi Barat	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
71	Masni	Ririnfos	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
72	Masni	Sembab	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
73	Masni	Sibuni	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024

NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI PRIORITAS									PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG per-KAMPUNG
				BIMBINGAN TEKNIS BAGI KEPALA KAMPUNG	PELATIHAN REGISTRASI BUMDes	BPJS TK PEMERINTAH KAMPUNG DAN BAMUSKAM	BPJS KESEHATAN PEMERINTAH KAMPUNG	SOSIALISASI REGULASI DAN PEMILIHAN BAMUSKAM	PELATIHAN SIKAMPUNG	PELATIHAN KPM DAN IDM	PELATIHAN SISKEUDES	PELATIHAN KADER TEKNIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)
74	Masni	Sumber Boga	350,000	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	377,524
75	Masni	Undi	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
76	Masni	Urey	302,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
77	Masni	Wamfoura	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
78	Masni	Wariori	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
79	Masni	Wariori Indah	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
80	Masni	Yensum	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
81	Masni	Yonsoribo	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
82	Prafi	Aimasi	326,912	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	354,436
83	Prafi	Bedip Matoa	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
84	Prafi	Bogor	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
85	Prafi	Desay	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
86	Prafi	Ingkwoisi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
87	Prafi	Kali Amin	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
88	Prafi	Kerenu	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
89	Prafi	Lismaungu	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
90	Prafi	Mebji	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
91	Prafi	Prafi Mulya	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
92	Prafi	Somi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
93	Prafi	Udapi Hilir	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
94	Prafi	Uhyehebrig	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
95	Prafi	Umbuy	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
96	Prafi	Wasegi Indah	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
97	Prafi	Waseki Pop	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
98	Sidey	Kaironi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
99	Sidey	Kassi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
100	Sidey	Manggupi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
101	Sidey	Meyof I	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
102	Sidey	Saray	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
103	Sidey	Sidey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
104	Sidey	Sidey Baru	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
105	Sidey	Sidey Jaya	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
106	Sidey	Sidey Makmur	332,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	360,024
107	Sidey	Waramui	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
108	Sidey	Wariki	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
109	Sidey	Womnowi	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
110	Tanah Rubuh	Ayawi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
111	Tanah Rubuh	Cuyehep	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
112	Tanah Rubuh	Hanghouw	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
113	Tanah Rubuh	Imbeisika I	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136

NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI PRIORITAS									PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG per-KAMPUNG
				BIMBINGAN TEKNIS BAGI KEPALA KAMPUNG	PELATIHAN REGISTRASI BUMDes	BPJS TK PEMERINTAH KAMPUNG DAN BAMUSKAM	BPJS KESEHATAN PEMERINTAH KAMPUNG	SOSIALISASI REGULASI DAN PEMILIHAN BAMUSKAM	PELATIHAN SIKAMPUNG	PELATIHAN KPM DAN IDM	PELATIHAN SISKEUDES	PELATIHAN KADER TEKNIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)
114	Tanah Rubuh	Imbeisika II	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
115	Tanah Rubuh	Imboiti	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
116	Tanah Rubuh	Imhasuma	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
117	Tanah Rubuh	Indibo	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
118	Tanah Rubuh	Mbatma	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
119	Tanah Rubuh	Menyufoku	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
120	Tanah Rubuh	Mirowi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
121	Tanah Rubuh	Misabugoid	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	-	1,500	2,500	2,500	318,536
122	Tanah Rubuh	Ningdip	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
123	Tanah Rubuh	Rembuy	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
124	Tanah Rubuh	Ukemboisi	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
125	Tanah Rubuh	Ukopti	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
126	Tanah Rubuh	Umnum	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
127	Tanah Rubuh	Urwambe	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
128	Tanah Rubuh	Warami	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
129	Tanah Rubuh	Wariari	295,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	317,136
130	Tanah Rubuh	Warkapi	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
131	Tanah Rubuh	Warmawai	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
132	Tanah Rubuh	Warnyeti	322,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	345,024
133	Tanah Rubuh	Wedoni	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
134	Warmare	Aiwow	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
135	Warmare	Amber	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
136	Warmare	Asarbey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
137	Warmare	Bahamyenti	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
138	Warmare	Dindey	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
139	Warmare	Duweibey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
140	Warmare	Duwin	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
141	Warmare	Figoud	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
142	Warmare	Guentuy	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
143	Warmare	Hingk	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
144	Warmare	Iboisrati	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
145	Warmare	Ibuwau	300,200	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	322,136
146	Warmare	Indisey	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
147	Warmare	Indonbey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
148	Warmare	Kipuwau	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
149	Warmare	Kwau	332,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	355,024
150	Warmare	Madrat	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
151	Warmare	Meny	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
152	Warmare	Mingre	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
153	Warmare	Minoqbey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024



NO.	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI PRIORITAS									PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG per-KAMPUNG
				BIMBINGAN TEKNIS BAGI KEPALA KAMPUNG	PELATIHAN REGISTRASI BUMDes	BPJS TK PEMERINTAH KAMPUNG DAN BAMUSKAM	BPJS KESEHATAN PEMERINTAH KAMPUNG	SOSIALISASI REGULASI DAN PEMILIHAN BAMUSKAM	PELATIHAN SIKAMPUNG	PELATIHAN KPM DAN IDM	PELATIHAN SISKEUDES	PELATIHAN KADER TEKNIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)
154	Warmare	Mokwam	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
155	Warmare	Ngungguen	297,600	7,500		2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	319,536
156	Warmare	Nimbay	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
157	Warmare	Snaimboy	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
158	Warmare	Sotea	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
159	Warmare	Sraindebey	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
160	Warmare	Subsai	297,600	7,500	5,000	2,448	2,688	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	324,536
161	Warmare	Syou	307,500	7,500	5,000	2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	335,024
162	Warmare	Tanah Merah	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
163	Warmare	Umcen	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
164	Warmare	Warmare	307,500	7,500		2,652	3,072	1,800	1,000	1,500	2,500	2,500	330,024
<b>Total</b>			<b>50,073,912</b>	<b>1,230,000</b>	<b>240,000</b>	<b>423,096</b>	<b>481,536</b>	<b>295,200</b>	<b>163,000</b>	<b>246,000</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>53,972,744</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADK Kabupaten Manokwari	53,972,744
Hasil Perhitungan Pagu ADK Kabupaten Manokwari	53,972,744
Pagu Alokasi Dasar ADK Kabupaten Manokwari	50,073,912
Hasil Hitung Alokasi Dasar ADK Kab. Manokwari	50,073,912
Pagu Alokasi Kegiatan Prioritas Kab. Manokwari	3,735,832
Hasil Hitung Alokasi Kegiatan Prioritas Kab. Manokwari	3,735,832
Jumlah Kampung	164

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 7 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 13

Ditetapkan di Manokwari  
pada 7 Februari 2021  
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004